

## Teknologi Informasi dalam Smart City di Makassar

Sitti Harlina<sup>1)</sup>, M. Syukri Mustafa<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Program studi teknik Komputer, STMIK Dipanegara Makassar

Jalan perintis kemerdekaan km.9 makassar

[Sitiharlina76@gmail.com](mailto:Sitiharlina76@gmail.com), [moh.sukri@gmail.com](mailto:moh.sukri@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi telah menuntut suatu daerah untuk dapat menjadi bagian dari smart city, dengan mengacu pada prinsip: Peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai – nilai kepatutan, dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri, atas dasar inilah Makassar sebagai salah satu kota besar berkeinginan untuk dapat mewujudkan Makassar dengan smart city.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintah Kota Makassar, basis data yang dibutuhkan oleh pemerintahan Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari 38 basis data, dan untuk membangun aplikasi smart city e-Government Pemerintah kota Makassar yang cukup banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan rencana pengembangan yang terstruktur, sistem birokrasi yang lebih bersih, cepat, dan transparan telah tercapai. Semua sektor pelayanan publik ditingkatkan dalam rangka menyasar fase Masyarakat Sejahtera Standar Dunia. Pengangguran diberdayakan untuk sektor kebersihan, lalu lintas, hingga pariwisata

Kata kunci: Teknologi Informasi, Smart City, Makassar, Aplikasi

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah menuntut suatu daerah untuk dapat menjadi bagian dari smart city, dengan mengacu pada prinsip: Peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai – nilai kepatutan, dapat dipertanggung jawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri, atas dasar inilah kota makassar sebagai salah satu kota besar berkeinginan untuk dapat mewujudkan Makassar dengan smart city. Smart city berarti kota pintar, merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk suatu wilayah (khususnya perkotaan) sebagai sebuah interaksi yang kompleks diantara berbagai sistem yang ada didalamnya.

Konsep smart city berdasarkan United Nasional bertujuan untuk membentuk kota yang sustainable (ekonomi, sosial, lingkungan), membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Smart city menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang efisien. Untuk menggambarkan adanya indikasi upaya pemerintahan suatu kota menuju smart city terkhusus pada implementasi teknologi informasi yang smart, maka diperlukan suatu transformasi informasi agar kota lebih cerdas. Dalam berbagai literatur, transformasi itu sendiri digambarkan melalui beberapa tipe secara konseptual antara lain: pemerintahan yang smart, pengambilan keputusan yang smart, administrasi yang smart, serta kolaborasi yang smart (*Albert Meijer: 2013:4*). Pada mulanya smart city bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah dalam meningkatkan layanan publik. Gaffinger dan kawan-kawan mendefinisikan smart city sebagai sebuah performansi yang sangat baik untuk sebuah kota, yang didukung oleh kombinasi yang pintar (smart) dari segala aktivitas, kajian, penemuan, serta kesadaran dari masyarakat kota tersebut. Smart city mampu memberikan dampak positif bagi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, transportasi, kualitas hidup, persaingan yang sehat disegala bidang, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Smart city diharapkan mampu menjawab minimal 3 (tiga) hal penting dari sebuah kota, yaitu: (a) mengetahui (sensing) keadaan kota, (b) memahami (understanding) keadaan kota lebih jauh, dan (c) dapat melakukan aksi (acting) terhadap permasalahan yang timbul. Konsep smart city dihadirkan untuk memberikan jawaban untuk pengelolaan sumber daya manusia secara efisien.

Dalam rangka mendukung penerapan smart city di kota Makassar, pemerintah telah menghibahkan 4 aplikasi umum untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan smart city belum seluruhnya diterapkan karena berbagai kendala yang dihadapi. Salah satu kendalanya adalah perilaku. Salah satu contohnya adalah perilaku birokrasi yang bekerja terlalu lamban dalam melayani masyarakat. Untuk itulah diperlukan sosialisasi dan pelatihan guna merubah pola pikir mereka, sehingga apa yang dicanangkan dengan semboyan *sombere* dapat terealisasi dan memberikan hasil yang baik guna peningkatan layanan kepada masyarakat.

## **2. Landasan Teori**

### **2.1 Penelitian Terkait**

Andi Daldo [1], tesis Analisis program Smart City di Kota Makassar [2013], deskripsi kualitatif untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik dengan sistem elektronik dikemas dalam program Smart City di Kota Makassar pelayanan publik dengan sistem elektronik di kecamatan Panakkukang yang ditunjuk sebagai pilot project berjalan dengan baik tetapi karena minimnya Sumber daya manusia dan anggaran yang tersedia, keterbatasan infrastruktur seperti komputer yang tersedia hanya 1 unit setiap kelurahan, tidak adanya jaringan internet dan minimnya sosialisasi yang di lakukan pemkot pada tingkat kelurahan sehingga program smart city tidak mampu tersosialisasi pada masyarakat.

Siti Widharetno Mursalim[2], jurnal Implentasi kebijakan smart city di kota Bandung [2017], analisis deskriptif untuk mengetahui implementasi kebijakan smart city di kota Bandung dengan komunikasi kepada SKPD atau Dinas-Dinas dalam lingkup kota Bandung Dalam mewujudkan tujuan smart city di kota Bandung memerlukan waktu yang cukup lama karena masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tentang smart city, karena itu warga kota Bandung harus menjadi smart people, yang didahului untuk menjadi smart Government sebagai implementator smart city.

Dwita widyaningsih[3], Tesis Kota Surabaya menuju smart city (2013), analisa deskriptif kualitatif adalah merumuskan tahapan-tahapan pembangunan dalam proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city dan menemukan struktur (pondasi/pilar) proses pembangunan Kota Surabaya menuju smart city Smart city di Kota Surabaya sudah mulai diterapkan dengan 6 komponen smart city yaitu smart government, smart living, smart environment, smart mobility, smart economy dan smart people, dalam mewujudkan smart city ini dibantu dengan 4 fase pembangunan yaitu pembenahan kinerja pemerintah, pengembalian kepercayaan masyarakat, pengembangan pelayanan berbasis TIK, dan fase pengembangan sistem dengan teknologi tinggi.

### **2.2 Parameter Smart City di Makassar.**

Telah menjadi Sasaran Pembangunan dalam RPJMD TAHUN 2014-2019, adapun Kebijakan umum Smart City diantaranya; 1) Publikasi laporan kinerja, 2) Gerakan smart-city, 3) Penguatan SDM dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perencanaan, 4) Pengembangan elektronik Government Program strategi didalam dokumen.

- Meletakkan visi dan misi pelaksanaan pemerintahan, infrastuktur kota, lingkungan, keuangan, berbasis smart city
- Smart city telah menjadi target dan sasaran kinerja Rencana Strategi setiap SKPD Sekota Makassar.
- Program strategi Smart City meliputi; 1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, 2) Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi, 3) Program Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi,
- Peraturan wali kota Makassar Tentang Pemasangan CCT
- Masterplan pembangunan menara telekomunikasi

## **3. Pembahasan**

### **3.1. Publikasi Laporan Kinerja**

Pemerintah Kota Makassar adalah satu organisasi yang memiliki satu visi dan misi dan program-program kerja untuk merealisasikan visi dan misi tersebut. Program-program kerja ini dijalankan berbagai satker yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, kerja satker-satker ini harus selaras satu sama lain agar visi dan misi Pemerintah Kota Makassar bisa diwujudkan. Untuk menyelaraskan ini diperlukan koordinasi dan informasi. Koordinasi mengatur kerjasama dan pembagian kerja. Informasi diperlukan agar program pembangunan yang dijalankan bisa tepat sasaran. Pertukaran data dan informasi juga diperlukan untuk memantau jalannya dan Tingkat keberhasilan program-program pembangunan. Pembagian informasi (information sharing) akan bisa di lakukan lebih cepat dan berjangkauan luas bila suatu organisasi memanfaatkan Teknologi Informasi

Pentingnya data dan informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan membuat Pemerintah Kota membutuhkan strategi teknologi informasi (TI) yang terencana dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal membutuhkan koordinasi lintas-SKPD karena teknologi informasi digunakan untuk mendukung tugas-tugas pokok pemerintah Kota, di mana di dalamnya suatu SKPD bisa bertugas melayani masyarakat ataupun melayani sesama SKPD. Karena itulah perencanaan strategi teknologi informasi (TI) juga membutuhkan keterlibatan SKPD-SKPD lain. Strategi teknologi informasi merupakan bentuk pengkoordinasian di bidang perencanaan, Setda dan BAPPEDA kemudian membentuk tim berupa *Government Chief of Information Officer* yang terdiri dari sejumlah kepala SKPD yang paling banyak berkepentingan dengan informasi, baik yang menggunakan ataupun yang menyediakan. BAPPEDA bisa menganalisa berdasarkan pekerjaan masing-masing, SKPD mana saja yang paling berkepentingan dengan data. Misalnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menjadi salah satu anggota *Government Chief of Information Officer* karena data yang bisa dikumpulkan dari kegiatan perijinan bisa dimanfaatkan oleh SKPD- SKPD lain. Bahkan SKPD lain juga bisa turut mengusulkan butir-butir data apa saja yang bisa ditambahkan untuk diisi oleh masyarakat yang mengajukan ijin. Kepala-Kepala dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan perlu turut serta karena program-program kerja mereka jadi prioritas kebijakan Pemerintah Kota. Selain itu Kepala Dishubkominfo Kota Makassar harus turut serta untuk memberikan masukan potensi-potensi teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota.

Hasil keputusan dari *Government Chief of Information Officer* ini bisa menjadi dasar pengembangan sistem informasi, dan penentuan siapa harus menyediakan data apa. Dengan demikian bisa dihindari adanya tumpang tindih penyediaan data, sehingga untuk data tertentu cukup satu satuan kerja saja yang menyediakan, sedangkan yang lain tinggal memanfaatkannya. Jika ada kekurangan dalam hal data bisa diajukan ke *Government Chief of Information Officer* untuk mengatasinya.

Government Chief of Information Officer memiliki peran sebagai berikut:

- menciptakan sinergi yang optimal antara proses-proses pelayanan publik dan administrasi pemerintahan dengan sistem-sistem informasi dan aplikasi komputer yang ada.
- merumuskan visi Teknologi Informasi yang diselaraskan dengan visi dan tujuan organisasi
- mengkomunikasikannya ke seluruh *stakeholders*
- merencanakan dan menyiapkan rancangan tatakelola Teknologi Informasi (*IT governance*) yang akan menjadi basis bagi manajemen aktivitas-aktivitas berbasis TI
- menjamin optimalitas pemanfaatan Teknologi Informasi di organisasi.

### **3.2 Gerakan Smart - City**

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bersama-sama secara resmi meluncurkan Gerakan Menuju 100 Smart City pada tanggal 22 Mei 2017. Kota Makassar menjadi tempat berlangsungnya seremoni peluncuran program, sekaligus kota tempat dimulainya (kick-off) program Gerakan Menuju 100 Smart City. Terpilihnya kota Makassar sebagai tempat peluncuran program sudah sangat tepat, mengingat ibukota propinsi Sulawesi Selatan tersebut selama ini telah menerapkan konsep untuk menjawab Smart City, yakni konsep Kota Sombere dan Kota Smart. Sombere dalam bahasa Makassar artinya keramahtamahan, kerendahan hati, dan persaudaraan. Konsep ini lalu menjadi bentuk muatan kultural dalam pemanfaatan teknologi digital (Smart) di kota Makassar. Makassar sebagai salah satu kota terbesar di Asia Tenggara dihuni sekitar 1,7 juta jiwa dengan *background* masyarakat multikultur. Tentu hal ini menjadi tantangan pengelola kota dengan konsep Smart City, tapi dengan merangkul seluruh lapisan masyarakat, partisipasi publik terhadap program kota meningkat secara signifikan, hingga 2016 sistem birokrasi yang lebih bersih, cepat, dan transparan telah tercapai. Semua sektor pelayanan publik ditingkatkan dalam rangka menysar fase Masyarakat Sejahtera Standar Dunia. Pengangguran diberdayakan untuk sektor kebersihan, lalu lintas, hingga pariwisata.

Infrastruktur, transportasi, dan penghijauan tak luput dari perhatian. Reklamasi di kawasan Pantai Losari berkembang ke megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) yang diperuntukkan sebagai kawasan bisnis global terpadu. Di tahun 2017 direncanakan pembangunan jalan tol dalam kota, *Light Railway Train* (LRT), dan unit transportasi publik Smart Pete-pete. Untuk pengembangan konsep Smart City, hingga saat ini 69 unit dari target 3.000 kamera CCTV telah terpasang di sejumlah titik strategis kota dan dikontrol selama 24 jam melalui Makassar Operation Room. Dalam sektor kesehatan, program Makassar Home Care sejak tahun 2016 lalu kian optimal. Sebanyak 48 unit mobil Home Care selalu siaga untuk menyambangi para pasien. Program Home Care Dottorotta tidak memandang status warga. Siapa pun yang menghubungi Call Center Home Care akan didatangi tim medis reaksi cepat sesuai dengan kondisi penyakit warga. Tim medis yang datang ke rumah warga terdiri dari perawat,

dokter atau bidan, tergantung kebutuhan pasien, dengan menggunakan Ambulance Mini Dottorotta yang dilengkapi peralatan dan obat-obatan standar. Dokter akan memeriksa kondisi pasien untuk menentukan tindak lanjut, dirawat di puskesmas atau di rumah sakit. Jika tidak membutuhkan perawatan serius, warga di edukasi untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas. Selain menunggu telepon warga yang membutuhkan layanan kesehatan, tim Home Care juga siap melayani perawatan pasien pasca operasi. Setelah pihak rumah sakit menginformasikan ke Dinas Kesehatan Makassar yang kemudian meneruskan ke puskesmas yang terdekat dari rumah warga yang sakit.

Berkat layanan ini Pemerintah kota Makassar berhasil meraih penghargaan Top 35 Inovasi Pelayanan Publik di tahun 2016.

**Tabel 3.1. Evaluasi Program Pembangunan**

Program kerja	Tujuan	Sasaran	Indikator keberhasilan	Pelaksana	Timeline
Smart Governance: - Public Service (Home Care)	Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat	Masyarakat	- Jumlah masyarakat yang terlayani - Tingkat kepuasan masyarakat	Puskesmas	2015
- Smart Governance Pete-pete smart (program unggulan)	Memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat	Masyarakat	- Kemacetan lalu lintas teratasi - Kepuasan pengguna transportasi	Dinas Perhubungan	2017
- Smart Living : Temam PACAR (Apartemen tanggap bencana)	Sebagai tempat penampungan sementara bagi korban bencana	Masyarakat korban bencana	- Terpenuhinya penampungan yang layak bagi korban bencana	Dinas Perumahan dan kawasan pemukiman	2017
- Smart Environment Pengelolaan sampah cerdas	Pengelolaan sampah yang efisien dan realtime	Bak Sampah	- Tidak ada sampah yang menumpuk di bak sampah - Kebersihan kota semakin meningkat	Kecamatan	2017
- Smart Governance: Smart Energy	Pengelolaan lampu jalan secara efisien dan realtime	Lampu jalan	- Efisiensi energi	Dinas PU	2016
- Smart Governance: Public service (Home Care)	Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat	Masyarakat	- Jumlah masyarakat yang terlayani - Tingkat kepuasan masyarakat	Puskesmas	2015

Dari uraian di atas terlihat evaluasi program pembangunan dalam rangka smart city di Makassar. Peran teknologi dalam informasi dalam pengembangan smart city merupakan perencanaan strategis dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat menyeluruh, terpadu serta terkoordinasi yang secara dinamis dan

realistis memperhitungkan serta mengkaitkan aspek-aspek manajemen kelembagaan, hukum dan perundang-undangan, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, jaringan komunikasi data dan lain-lain.

### **3.3 Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) perencanaan,.**

Beberapa kriteria digunakan dalam menentukan tahapan serta prioritas pengembangan smart city dan e-Government pemkot Makassar, namun kriteria utama yang menjadi acuan adalah pembangunan sistem informasi yang dapat secara efektif mendukung visi, misi serta strategi pemkot Makassar. Pemetaan sistem informasi dilakukan untuk menentukan klasifikasi setiap system informasi sesuai karakteristik dan blok fungsinya dalam sistem pemerintahan daerah, untuk memastikan dukungan setiap sistem informasi terhadap tugas fungsi serta proses kerja yang ada dalam SKPD pemkot Makassar.

Peningkatan kemampuan Sumber Daya Masyarakat (SDM) dalam bidang-bidang diatas sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara internal ataupun secara eksternal. Untuk itu dibutuhkan adanya pusat pendidikan dan pelatihan dalam bidang teknologi informasi yang mampu menyediakan jasa pelatihan dibidang teknologi informasi yang dibutuhkan.

Selain melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan kemampuan sumber daya manusia ini juga dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal sehingga tersedia personil-personil dengan kualifikasi dari D3 sampai dengan S3 dibidang teknologi informasi.

Selain dari pada itu pembinaan karier dan pemberian insentif yang memadai bagi para personil di bidang teknologi informasi ini perlu dipertimbangkan melalui penyediaan jalur jabatan fungsional di bidang teknologi informasi. Jalur fungsional dibutuhkan karena karakteristik profesional yang sangat berbeda dari sumber daya manusia yang menangani system informasi ini. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat jika ia tetap pada posnya. Berbeda dengan jenjang karier struktural biasa dimana seseorang akan semakin berguna dengan jabatan yang semakin tinggi, maka dalam pengelolaan system informasi ini, seseorang akan menjadi semakin ahli dan semakin berguna dengan tetap pada pos / pekerjaannya. Dengan demikian diperlukan mekanisme apresiasi yang berbeda bagi mereka. Jalur fungsional yang dapat dipilih adalah jalur fungsional pranata komputer dan jalur fungsional perekayasa.

### **3.4 Pengembangan elektronik Government Program strategi didalam dokumen.**

Diperlukan analisa kondisi ideal yaitu analisa ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kondisi ideal yang diharapkan dari penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah khususnya. Analisa kondisi ideal didasarkan pada kondisi serta trend teknologi informasi saat ini, dan mengingat bahwa teknologi informasi berkembang seiring dengan waktu dan dengan kecepatan yang tinggi, maka kondisi ideal inipun harus disesuaikan kembali dalam satuan waktu tertentu.

Penerapan teknologi informasi di pemerintahan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Sesuai dengan yang telah digariskan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dalam paragraf Tujuan Pengembangan e-Government yang diarahkan untuk mencapai 4 tujuan utama, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Dalam kerangka ini fungsi teknologi informasi tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan driver of change atau sebagai hal yang justru menawarkan terjadinya perubahan-perubahan mendasar sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian keseluruhan tujuan tersebut adalah merupakan perwujudan dari kondisi ideal dimana pemerintah dengan dukungan informasi mampu memberikan pelayanan yang responsive dan berkualitas pada masyarakat umum, kalangan dunia usaha ataupun pelayanan antar lembaga pemerintah

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dari hasil survei dan wawancara di pemerintah Kota Makassar, basis data yang dibutuhkan oleh pemerintahan Kota Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari 38 basisdata, dan untuk membangun aplikasi smart city e-Government Pemerintah kota Makassar yang cukup banyak jumlah serta ragam jenisnya, diperlukan suatu tahapan rencana pengembangan yang terstruktur, sistem birokrasi yang lebih bersih, cepat, dan transparan telah tercapai. Semua sektor pelayanan publik ditingkatkan dalam rangka menyasar fase Masyarakat Sejahtera Standar Dunia. Pengangguran diberdayakan untuk sektor kebersihan, lalu lintas, hingga pariwisata

##### **- Untuk Smart Governance**

Sasaran : mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, kolaboratif dan berkarifan lokal melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi.

Dalam hal pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, efisiensi kebijakan publik

##### **- Smart Branding**

Sasaran : peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Dalam hal membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, membangun platform dan memasarkan ekosistem pariwisata bisnis daerah, membangun dan memasarkan wajah kota.

##### **- Smart Economy**

Sasaran : mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Dalam hal membangun ekosistem industri yang berdaya saing, mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun ekosistem transaksi keuangan, kesejahteraan

##### **- Smart Living**

Sasaran : mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.

Dalam hal membangun harmonisasi tata ruang wilayah, mewujudkan prasarana kesehatan, menjamin ketersediaan transportasi

##### **- Smart Society**

**Sasaran :** mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Dalam hal ini mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien, membangun ekosistem belajar yang efisien, mewujudkan sistem keamanan masyarakat

##### **- Smart Environment**

**Sasaran :** mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini mengembangkan program proteksi lingkungan, mengembangkan tata kelola sampah dan limbah, mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung jawab.

##### **4.2. Saran**

Diharapkan dengan adanya smart city di kota Makassar dapat dijadikan sebagai pusat data yang mampu mengaktualisasi informasi dan mengolahnya sehingga menghasilkan informasi yang terkini dengan smart city, dan pengembangan penelitian kedepannya tentang smart city khususnya di kota Makassar dapat lebih memberi manfaat buat seluruh lapisan masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Ahmad Khusni, dkk, Strategi Implementasi Smart-City "Makalah Mata Kuliah Regulasi Telematika dkk, Program Studi Teknik Telekomunikasi, Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom, Purwokerto, 2015.
- [2] I Putu Agus Eka Pratma, ST.,M.T., "Smart City beserta Cloud Computing dan Teknologi -Teknologi Pendukung lainnya", Informatika di kota Semarang,"oleh Tika Dhiniyani Mirawati, 2012.
- [3] Sri Widharetno Mursalim, Jurnal Ilmu administrasi nomor1 Volume 14, Juni 2017," Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung", Uuniversitas Sangga Buana YPKP Bandung.
- [4] IT MASTER PLAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR 2014-2019
- [5] Sumber : Buku Panduan Pendampingan Smart City, Senin, 02 Oktober 2017.